

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah serius membatasi kegiatan impor untuk menekan defisit neraca pembayaran dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor terkait dengan ancaman neraca pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatasi impor melalui peningkatan tarif impor barang non migas karena adanya ancaman terhadap neraca pembayaran bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO dan bagaimana solusi hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman neraca pembayaran sesuai dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi, dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan notifikasi untuk membuat kebijakan pembatasan impor dengan tujuan mengamankan neraca pembayaran kepada komite neraca pembayaran WTO, sehingga hal ini membuat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia rawan untuk digugat atau dinaikan tarif impornya oleh negara lain secara sepihak. Solusi hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan notifikasi kepada WTO mengenai kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor terkait ancaman neraca pembayaran. Saran dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Indonesia sebaiknya segera untuk memberi notifikasi kepada WTO terkait dengan kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan ancaman neraca pembayaran atau kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor ini sebaiknya dihilangkan atau diturunkan ke level sebelumnya.

Kata kunci : Pembatasan Impor, Barang Non Migas, Neraca Pembayaran

ABSTRACT

The Indonesian government through the Ministry of Finance is seriously limiting import activities to reduce the balance of payments deficit by issuing import restriction policies by increasing import tariffs related to the balance of payments threat. This study aims to examine whether the Indonesian government's policy to limit imports through increasing tariffs on non-oil and gas goods imports due to threats to the balance of payments is contrary to the provisions of the GATT / WTO and how legal solutions that should be carried out by the Indonesian government in dealing with payment balance threats in accordance with GATT provisions / WTO. In answering these problems, a normative juridical approach is used. Data obtained from secondary data, analyzed by interpretation method, and presented in descriptive analysis. The results showed that the Government of Indonesia did not provide a notification to make import restriction policies with the aim of securing the balance of payments to the WTO balance of payments committee, so that this made policies made by the Indonesian Government prone to sued or increased import tariffs by other countries unilaterally. The legal solution that must be done by the Indonesian government is to provide a notification to the WTO regarding the policy of restricting imports by increasing import tariffs related to the threat of balance of payments. The suggestion in this study is that the Indonesian Government should immediately notify the WTO regarding import restriction policies by increasing import tariffs carried out by the Government of Indonesia related to the threat of balance payments or import restriction policies by increasing import tariffs which should be eliminated or reduced to previous level.

Keywords: Import Tariffs, Balance-of-Payments, Non-Oil and Gas Goods